



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : 454/A.3/B.3/2019

Jakarta, 17 MAY 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Perpanjangan Waktu Pendaftaran Seleksi Terbuka
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BKPM

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga/
2. Sekretaris Daerah/Provinsi
(daftar terlampir)

di tempat

Memperhatikan surat kami No 335/A.3/B.3/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan ini kami informasikan perpanjangan waktu pendaftaran Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara mohon kiranya dapat menginformasikan mengenai seleksi terbuka tersebut kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di lingkungan instansi Saudara. Informasi lengkap kegiatan dimaksud dapat diunduh pada *website* www.bkpm.go.id

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,



Tembusan Yth:

1. Kepala BKPM
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Lampiran I

Nomor : 454 / A.3 / B.3 / 2018

Tanggal : 17 MAY 2019

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. LEMBAGA TINGGI NEGARA

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
- ✓ 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Makamah Agung;
5. Sekretaris Jenderal Makamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

B. SEKRETARIS KEMENTERIAN DAN SETINGKAT KEMENTERIAN

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;

26. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi;
32. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
34. Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.

C. SEKRETARIS KEMENTERIAN DAN SETINGKAT KEMENTERIAN

1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
3. Sekretaris Utama Badan Kepagawaian Negara;
4. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
9. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
12. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
13. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
14. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
15. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
16. Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Sekretaris Utama Badan Pertahanan Nasional;
18. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
19. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional;
20. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
21. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
22. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
23. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
24. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
26. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
27. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara;
28. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
29. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia.

Lampiran II

Nomor : 454 / A.3 / B.3 / 2018

Tanggal : 17 MAY 2019

DAFTAR SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.